



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RKT

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 merupakan acuan dan tuntunan bagi setiap penanggung jawab kegiatan kesekretariatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kondisi lokal dan kepentingan nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Secara rinci Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 berisi target dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 disajikan dalam dokumen ini.

Diharapkan semua unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar mempedomani Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2025. Semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup	3
BAB II	4
Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran.....	4
A. Visi.....	4
B. Misi	6
C. Tujuan.....	17
D. Sasaran	18
BAB III	19
PERENCANAAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Rincian Program dan Kegiatan.....	19
BAB IV.....	39
PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026	5
Tabel 1. 2. Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Banjar Tahun 2021 2026	15
Tabel 3.1. Rencana Kinerja tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. ..	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun seperti yang tertuang di pasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026.

Di dalam kerangka akuntabilitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam perspektif yang lebih luas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dalam ranah akuntabilitas publik.

Berhasilnya kinerja instansi Pemerintah memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh satuan organisasi sebagai unsur dan pendorong utama dalam akuntabilitas publik sebagai perwujudan pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Sebagai bagian dari SAKIP, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Hasil dari proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) juga merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, antisipatif, realistis untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Banjar dan merupakan jembatan antara Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar 2016-2021 yang telah disusun dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1. Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Adapun maksud Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Adapun tujuan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sebagai bahan monitoring, evaluasi dan *updating* kinerja yang akan dipertanggungjawabkan sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (*good governance*) sesuai tugas dan kewenangannya.

C. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 memuat informasi tentang visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, tujuan, sasaran, kebijakan umum anggaran, strategi prioritas, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

A. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, visi pembangunan Kabupaten Banjar sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih adalah “***Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan***”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1. Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang. ➤ Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development Index</i> (HDI).
MANDIRI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. ➤ Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. ➤ Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.

AGAMIS	<p>Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.</p>
GOTONG ROYONG	<p>Gotong royong dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan pembangunan. Gotong royong di sini mengandung arti semangat saling membantu, saling mendukung, dan bekerja bersama untuk kemajuan daerah, baik dalam aspek fisik maupun sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, gotong royong dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat, serta penguatan partisipasi Masyarakat. Secara keseluruhan, gotong royong dalam pembangunan daerah membantu memperkuat rasa kebersamaan, mempercepat pencapaian pembangunan, serta menciptakan keberlanjutan dalam program pembangunan itu sendiri.</p>
BERKEADILAN	<p>Berkeadilan dapat diartikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memastikan perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, suku, agama, atau golongan. Dengan prinsip berkeadilan, pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, tanpa memihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setiap individu. Ini juga mencakup upaya untuk</p>

	menegakkan hukum dengan adil dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat dari pembangunan yang terjadi.
--	---

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, maka dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya.
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Adapun penjelasan dari misi tersebut diatas adalah:

1. Misi 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya, sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, dan terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Misi 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Misi 3: Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan terus melaksanakan upaya peningkatan kualitas infrastruktur daerah dengan tetap

memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik agar kehidupan masyarakat terjamin, serta bisa menurunkan risiko bencana.

4. Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani, yang diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan, sehingga dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya.
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Empat butir misi diatas merupakan janji politis Kepala Daerah Kabupaten Banjar terpilih kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Keempat misi tersebut diatas dijelaskan pada uraian berikut ini :

▪ **MISI 1 :**

MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER RELIGIUS, BERAKHLAK DAN BERBUDAYA

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pembangunan di Kabupaten Banjar memiliki misi untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter religius, berakhlak, dan berbudaya, yang dapat diartikan sebagai usaha untuk membentuk dan mengembangkan individu-individu yang tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, tetapi juga memiliki moralitas, etika, serta pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Secara spesifik, karakter religius memiliki makna yaitu mengembangkan individu yang memiliki pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu memanfaatkan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama.

Adapun akhlak yang baik: Membentuk karakter yang memiliki integritas, jujur, adil, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain, dengan berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi. Ini juga mencakup sikap toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan sosial. Sedangkan berbudaya, bisa diartikan sebagai kemampuan menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal maupun budaya universal yang memperkaya kehidupan masyarakat. Ini mencakup kesadaran akan pentingnya kebudayaan dalam memperkuat identitas bangsa serta menjalani kehidupan yang penuh rasa hormat terhadap perbedaan budaya di tengah globalisasi.

Dengan mengintegrasikan tiga aspek ini dalam pembangunan

SDM, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, berjiwa sosial, serta berbudaya.

▪ **MISI 2 :**

MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MANDIRI DAN INKLUSIF BERBASIS PEMERATAAN, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN.

Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki misi untuk memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, keadilan, dan berkelanjutan. Pembangunan Ekonomi yang Mandiri dapat diartikan bahwa Kabupaten Banjar dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonominya secara optimal tanpa terlalu bergantung pada daerah lain. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi yang mandiri bertujuan untuk menciptakan ketahanan ekonomi, dengan memanfaatkan potensi dalam negeri, seperti sumber daya alam, industri lokal, dan sumber daya manusia.

Adapun Pembangunan yang Inklusif, adalah pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sekelompok orang saja, tetapi mencakup semua lapisan masyarakat. Pembangunan harus dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memastikan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan atau rentan, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok minoritas.

Sedangkan Berbasis Pemerataan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di daerah-daerah tertentu atau pada kelompok tertentu saja, tetapi tersebar secara adil di seluruh wilayah dan masyarakat. Pemerataan pembangunan akan mengurangi kesenjangan antara wilayah, baik yang urban maupun

yang rural, serta antara kelompok-kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Dengan pemerataan, setiap individu atau daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Berkeadilan dan berkelanjutan dapat diartikan bahwa dalam pembangunan ekonomi hasil pembangunan didistribusikan secara adil, dimana setiap orang atau kelompok berhak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Pembangunan ekonomi juga tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang (berkelanjutan) terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Konsep ini terkait dengan keberlanjutan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana agar tidak merusak ekosistem atau menghabiskan sumber daya yang ada.

Secara keseluruhan, konsep ini berfokus pada menciptakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan untuk semua masyarakat, sambil memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar dititikberatkan pada ekonomi berbasis kerakyatan yang dapat mendorong kemandirian, produktif, berdaya saing dan kokoh dengan pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas sehingga mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, menurunkan angka pengangguran dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

▪ **MISI 3 :**

MEMPERKUAT TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP YANG PARTISIPATIF DAN BERKELANJUTAN.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang muncul dan berawal dari rasa keprihatinan negara-negara dunia terhadap

timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin mengkhawatirkan akan keberlangsungan fungsi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya terhadap kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang sangat luas, integratif dan komprehensif, tidak saja mengandung dimensifik-ekologis, melainkan juga sosial, budaya, politik dan hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang oleh karena ketimpangan itu cukup besar. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan bukan merupakan konsep yang statis dan deterministik (tidak dapat dirubah), namun merupakan suatu konsep yang dinamis dan terbuka sehingga perlu terus untuk dikaji dan dikembangkan. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan berarti meningkatkan cara pengelolaan dan pengawasan terhadap lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak (partisipatif) dan memastikan bahwa pengelolaan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam (berkelanjutan).

Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Partisipatif dapat diartikan bahwa semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, atau organisasi non-pemerintah, turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan pengelolaan lingkungan. Proses ini mencakup dialog, konsultasi, dan kerjasama antara berbagai stakeholder. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mewakili kepentingan banyak pihak dan lebih responsif terhadap kebutuhan serta masalah yang ada di lapangan. Dengan cara ini, keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok saja, tetapi juga mencakup kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dapat diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan dengan cara yang memastikan kebutuhan generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengelolaan yang berkelanjutan melibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta konservasi sumber daya alam. Hal ini juga mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, dan pengurangan polusi.

Konsep berkelanjutan ini mengarah pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga tidak ada yang dieksploitasi secara berlebihan atau merusak keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, misi memperkuat tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan berarti membangun kerangka kerja yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dan mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam untuk memastikan bahwa kualitas lingkungan hidup tetap terjaga bagi generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara adil dan efisien tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

- **MISI 4 :**
MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN MELAYANI

Konsep “*governance*” bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki kesamaan arti yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi lembaga atau negara. Definisi *government* atau pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan *governance* seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan

atau tidak (World Bank, 1989).

Selanjutnya, banyak definisi tentang *good governance*, namun definisi yang paling umum adalah pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992).

Pada misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026, misi keempat adalah Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional, Bersih, dan Melayani, yang memiliki makna bahwa pembangunan di Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemerintahan serta pengelolaan birokrasi agar lebih efektif dan efisien.

Makna Profesional dapat diartikan bahwa birokrasi harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme dalam pelayanan publik berarti pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur negara bekerja dengan keahlian yang memadai, serta mengikuti prosedur dan standar yang jelas.

Adapun Bersih, dapat dimaknai sebagai pemerintahan dan birokrasi yang harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini berarti memastikan bahwa semua proses administrasi dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau negara. Dan dalam melayani masyarakat pada pemerintahan harus memiliki orientasi pada pelayanan publik yang baik, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan harus cepat, tepat, dan memenuhi harapan publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperkuat aspek-aspek ini, diharapkan pemerintahan bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan sistem administrasi yang berkelanjutan dan adil.

Tata kelola pemerintahan dalam hukum Islam menghendaki pemerintahan yang bersih dan lembaga-lembaga pemerintahan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan profesional. Tugas dan tujuan utama pemerintahan adalah untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat.

Kabupaten Banjar sebagai kabupaten yang religius dengan julukan “*Serambi Mekkah*” memiliki ciri khas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni pemerintah yang amanah, baik, bersih, dan efektif. Sesuai dengan nilai-nilai Akhlak yang Baik (*Akhlakul Karimah*) seperti jujur yang tinggi (integritas), amanah atau tingkat kepercayaan yang tinggi (kredibilitas) oleh masyarakat.

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2. Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

VISI	Pokok Pokok VISI	Penjelasan
Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri, Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan	Maju	MISI 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya MISI 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan MISI 3: Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan MISI 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani
	Mandiri	MISI 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan MISI 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

	Agamis	MISI 5: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
	Gotong Royong	MISI 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya MISI 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan MISI 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani
	Berkeadilan	MISI 2: Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa misi ke 1 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, dan misi ke 2 “Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan”, serta misi ke 3 “Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu juga berkaitan dengan misi ke 4 “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani “ Keempat misi tersebut berkaitan erat dengan pokok Visi “Banjar Maju”. Maju dalam hal ini mencakup pada keempat misi yang telah diprogramkan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam Pembangunan Daerah.

Selanjutnya , pokok-pokok Visi “Banjar Mandiri” berhubungan dengan misi ke 2 “Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan dan misi ke 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”. Dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif serta potensi daerah untuk pengembangan ekonomi masyarakat diharapkan masyarakat Kabupaten Banjar menjadi lebih mandiri, kreatif dan kesejahteraan masyarakat menjadi merata, tidak ada terjadi kesenjangan signifikan pada taraf ekonomi masyarakat, serta kemandirian ini

berkelanjutan, bukan hanya sementara waktu. Dari semua itu diharapkan juga berdampak kepada upaya dalam mewujudkan penguatan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.

Adapun pokok-pokok Visi “Gotong-royong” berhubungan dengan misi ke 1 “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, dan misi ke 2 “Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan”, serta misi ke 4: “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”. Ketiga misi ini berkaitan erat dengan kondisi masyarakat Kabupaten Banjar yang beragam dan sejak dulu sudah dikenal sebagai masyarakat yang suka saling membantu dan bergotong-royong. Nilai luhur ini diharapkan dapat terus dilestarikan dan dikembangkan di bumi Kabupaten Banjar tercinta ini. Dengan bergotong-royong, pembangunan dan kemajuan Kabupaten Banjar, optimis Insya Allah dapat diwujudkan bersama-sama.

Pada akhir pokok-pokok visi adalah “Banjar Berkeadilan” berhubungan dengan misi ke 2 yaitu “Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan”. Masyarakat Kabupaten Banjar melaksanakan pembangunan ekonomi berlandaskan nilai-nilai mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan prinsip berkeadilan, pemerintah Kabupaten Banjar berupaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, tanpa memihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban setiap individu.

Hal ini diharapkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertin, aman dan demokratis. Masyarakat yang terhindar dari konflik vertikal dan horisontal. Masyarakat bersatu untuk kemajuan pembangunan di daerahnya.

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Perubahan Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun oleh Kabupaten Banjar sesuai dengan misi ke IV yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berintegritas dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Daerah, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Integritas Nasional
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik dan Indeks SPBE

D. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 antara lain :

1. Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan.
3. Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum.

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, diamanatkan agar setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Pengelolaan sumberdaya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategis Planning*) yang diharapkan melalui rencana strategis masing-masing SKPD. Sekretariat Daerah merupakan salah satu SKPD yang mempunyai peran yang sentral dalam pelaksanaan pemerintahan.

Perencanaan Strategis Daerah Kabupaten Banjar disusun dalam rangka mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan mengacu pada konsep visi **“Terwujudnya Kabupaten Banjar Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Berkeadilan”** dan misi **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani “** dengan Tujuan Sekretariat Daerah **“Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Dinamis”** dan **“Meningkatkan Ketertiban dan Stabilitas Daerah”**, serta **“Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan”**.

B. Rincian Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2025 sebanyak 3 Program, 19 kegiatan dan 71 Sub Kegiatan dengan rincian adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 4. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4. Pengadaan Alat Besar

e). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

g). Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

h). Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

i). Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Keprotokolan
2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

j). Penataan Organisasi

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

- k) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- 2. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Kegiatan :
 - a). Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

 - b). Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

 - c). Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Sub Kegiatan :
 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

 - d). Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

3. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan :

a). Administrasi Tata Pemerintahan

Sub Kegiatan :

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b). Fasilitasi Kerjasama Daerah

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

c). Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

d). Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Fasilitasi Bantuan Hukum
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Tabel 3.1
RENCANA KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	
				Target	Anggaran Rp.		
Terselenggaranya Reformasi Dalam Perencanaan, Penganggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat	82 86,70	Nilai Nilai	128.153.900	
			Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	47.926.479.100	Asisten I/ Bagian. Pemerintahan/ Bagian Hukum/ Bagian Kesra
			Nilai LPPD	3,175	Nilai	47.926.479.100	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	100	%		
			Nilai LPPD	3,175	Nilai		
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100	%	546.085.000	Bagian Pemerintahan
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100	%		
			Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	%		
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	Dokumen	122.888.000	Bagian Pemerintahan Kasubbag Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dokumen	147.816.000	Bagian Pemerintahan/ Kasubbag Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dokumen	275.381.000	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	100	%	54.203.757.500	Bagian Kesra
			Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial yang sesuai ketentuan	100	%	54.203.757.500	
			Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang kesejahteraan masyarakat yang sesuai ketentuan	100	%	54.203.757.500	
Persentase fasilitasi dan koordinasi di bidang bina mental dan spiritual keagamaan	100		%	54.203.757.500			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
				Target	Anggaran Rp.	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	42.896.974.000	Bagian Kesra/ Kasubbag Bina Mental dan Spiritual
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	4.747.400.000	Bagian Kesra/ Kasubbag Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	6.559.383.500	Bagian Kesra/ Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %	1.542.905.400	Bagian Hukum
			Persentase Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100 %		
			Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yg Disusun	100 %		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700 Dokumen	339.659.600	Bagian Hukum/ Kasubbag Perundang-undangan
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	60 Kasus	649.551.800	Bagian Hukum/ Kasubbag Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	650 Dokumen	553.694.200	Bagian Hukum/ Kasubbag Dokumentasi dan Informasi
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	107.232.700	Bagian Pemerintahan/ Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	107.232.700	Bagian Pemerintahan/ Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab
				Target	Anggaran Rp.	
Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100 %	1.958.378.600	Asisten II/ Bagian Perekonomian & SDA/ Bagian Administrasi Pembangunan/ Bagian PBJ	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	80 Skor/Nilai			
		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Dan Pembangunan	100 %			
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	80 Skor/Nilai			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Kebijakan lingkup urusan perekonomian	100 %	647.874.300	Bagian Perekonomian & SDA	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	20 Dokumen	417.778.700	Bagian Perekonomian & SDA/ Kassubag BUMD dan BLUD	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	230.095.600	Bagian Perekonomian & SDA/ Kassubag Perekonomian	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan	100 %	102.606.200	Bagian Administasi Pembangunan	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	46.325.500	Bagian Administasi Pembangunan/ Kasubbag Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	39.139.700	Bagian Administasi Pembangunan/ Kasubbag Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	17.141.000	Bagian Administasi Pembangunan/ Kasubbag Pengendalian Program		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	
				Target	Anggaran Rp.		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik	80	%	1.152.920.100	Bagian PBJ
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5	Dokumen	228.348.000	Bagian PBJ/ Kasubag Pengelolaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	Dokumen	429.018.100	Bagian PBJ/ Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	95	orang	495.554.000	Bagian PBJ/ Kasubag Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan kebijakan Sumber daya alam	100	%	54.978.000	Bagian Perekonomian dan SDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	Dokumen	21.068.000	Bagian Perekonomian & SDA/ Kasubag Sumber Daya Alam
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	92	Dokumen	33.910.000	
	Meningkatnya Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum		Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	%	49.601.071.295	Asisten III/ Bagian Organisasi/ Bagian Perencanaan & Keuangan/ Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan/ Bagian Umum/ Bagian Hukum
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	95	Nilai		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
				Target	Anggaran Rp.		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengkoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100	%	52.935.837.433	Asisten III/ Bagian Organisasi/ Bagian Perencanaan & Keuangan/ Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan/ Bagian Umum/ Bagian Hukum
			Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	95	Nilai		
		Penataan Organisasi	Tingkat efisiensi unit dan prestasi kerja unit Kab.Banjar bernilai Baik	1,3	Skor/Nilai	1.128.768.100	Bagian Organisasi
			Persentase pengelolaan tatalaksana	100	%		
			Persentase PD yang pelayanan publik bernilai Baik	100	%		
			Persentase PD pengelolaan RB bernilai Baik	100	%		
			Persentase PD SAKIP bernilai Baik	100	%		
			Persentase Penataan Organisasi	100	%		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	159.283.800	Bagian Organisasi/ Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7	Laporan	445.510.500	Bagian Organisasi/ Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7	Dokumen	346.949.800	Bagian Organisasi/ Kasubbag Kinerja dan Reformasi Publik
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Dokumen	81.164.000	Bagian Organisasi/ Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	Dokumen	95.860.000	Bagian Organisasi/ Kasubbag Kinerja dan Reformasi Publik		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Bagian yang berkinerja baik	100	%	128.153.900	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Persentase Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien	100	%		
		Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang akuntabel	100	%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	41.785.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Perencanaan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
				Target	Anggaran Rp.		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	28.495.400	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Pelaporan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28	Laporan	37.382.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Pelaporan
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	8.821.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Perencanaan
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	70	Data	11.670.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Pelaporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib administrasi	100	%	20.566.905.500	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	Orang/ Bulan	19.599.400.000	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Keuangan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	921.709.500	Bagian Perencanaan & Keuangan/ Kasubbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	16.750.000	Bagian Perencanaan & Keuangan/ Kasubbag Keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	22.816.000	Bagian Perencanaan & Keuangan/ Kasubbag Keuangan

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	6.230.000	Bagian Perencanaan & Keuangan/ Kasubbag Keuangan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	%	182.425.000 177.654.500	Bagian Umum dan Bagian Hukum
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlayani	100	%		
Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	-	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800	Orang	82.029.500	Bagian Hukum/ Kasubbag Dokumentasi dan Informasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	Orang	95.625.000	Bagian Umum/ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah terlayani	100	%	6.730.077.000	Bagian Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	49.694.000,	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
				Target	Anggaran Rp.		
		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2.858.920.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	200.823.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	27.540.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	45.600.000	Bagian Umum/ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3.547.500.000	Bagian Umum/ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	100	%	4.865.249.000	Bagian Umum
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Paket	1.429.399.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan	1	Paket	700.000.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	Unit	585.850.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	35	Unit	2.150.000.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai ketentuan	100	%	6.293.212.000	Bagian Umum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	95.000.000	Bagian Umum/ Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	1.372.767.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	657.895.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	4.167.550.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai ketentuan	100	%	6.943.933.442	Bagian Umum

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggungjawab	
				Target	Anggaran Rp.		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	unit	521.760.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	129	Unit	2.331.710.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7	Unit	50.330.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Unit	- 1.429.399.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit	73.205.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	3.034.492.942	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	479.755.500	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	300	Unit	452.680.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%	1.100.403.840	Bagian Umum/ Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Bagian Protokol &
			Persentase Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	%		

	Kepala Daerah	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH yang sesuai ketentuan	100	%		Komunikasi Pimpinan
		Persentase Penyediaan dan Penatausahaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	%		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	
				Target	Anggaran Rp.		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang/ Bulan	189.803.840	Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Keuangan
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	Paket	135.600.000	Bagian Umum/ Kasubbag Perlengkapan
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Orang	175.000.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	Orang/ Bulan	600.000.000	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Komunikasi Pimpinan
		Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan KDH yang sesuai ketentuan	100	%	3.023.246.000	Bagian Umum
			Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan WKDH yang sesuai ketentuan	100	%		
			Persentase Pelayanan Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang sesuai ketentuan	100	%		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	9	Paket	957.523.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8	Paket	595.127.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	17	Paket	1.470.596.000	Bagian Umum/ Kasubbag Rumah Tangga

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Penanggung Jawab	
				Target	Anggaran Rp.		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi keprotokolan kepada Pimpinan	100	%	3.356.020.600	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
			Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	%		
			Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	%		
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	2.092.742.200	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Protokol
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan	686.524.200	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	292.974.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/ Kasubbag Dokumentasi Pimpinan

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Dokumen ini merupakan pedoman resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dalam menjalankan aktifitas pada Tahun Anggaran 2025. Ada pun prioritas kegiatan dalam kisaran waktu tersebut adalah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan secara optimal, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik, melengkapi data yang akurat dan up to date, baik manual maupun elektronik, serta melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai bentuk penyempurnaan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 demi mewujudkan pemerintah yang baik (*good Governance*), berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel

dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, guna membina dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan manajemen strategis, sehingga akan diperoleh prospek (keuntungan/ kemakmuran), terutama untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun bisa memperlancar kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang optimal.

Martapura, 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. H. MOKHAMAD HILMAN, ST, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700328 199503 1 001